

## Implementasi Sistem Informasi dalam Diplomasi Militer Terhadap Pengambilan Keputusan Strategis

*(Strategy for Enhancing the Capacity of Indonesian Air Force Bases in Conducting Disaster Management Operations)*

Arief Hidayat, Yotanabey A.M, Ahmad Dohamid  
[nindiarief98@gmail.com](mailto:nindiarief98@gmail.com), [ahmaddohamid@idu.ac.id](mailto:ahmaddohamid@idu.ac.id)

<sup>1 2 3</sup>Universitas Pertahanan Republik Indonesia

**Abstrak.** *Nine dash line* merupakan klaim teritorial secara sepihak oleh Tiongkok atas wilayah perairan Laut China Selatan. Indonesia menyatakan tidak ada kompromi dalam mempertahankan kedaulatannya. Indonesia bersikap tegas sekaligus memprioritaskan usaha diplomatik secara damai dalam menangani konflik di Perairan Natuna. Diplomasi terkait pertahanan dan keamanan nasional adalah menggunakan diplomasi militer. Keberhasilan strategi diplomasi militer merupakan kolaborasi dari komponen diplomasi, pertahanan, dan pembangunan yang terintegrasi dalam suatu sistem informasi. Dalam konteks konflik di Laut China Selatan yang kompleks dan sensitif, pengambilan keputusan dalam situasi tersebut memerlukan informasi yang akurat, cepat, dan terkini untuk merumuskan kebijakan yang efektif. Metode penelitian menggunakan kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menggambarkan bahwa peran sistem informasi semakin krusial dalam mendukung pelaksanaan diplomasi militer yang efektif. Sistem informasi pendukung diplomasi militer belum optimal dikarenakan setiap pusat data dan pusat informasi di Kementerian Pertahanan dan di lingkungan TNI belum terintegrasi sepenuhnya. Cara *hedging* diputuskan berdasarkan analisa mendalam yang diperoleh dari sistem informasi. Tetapi, tanpa interoperabilitas, banyak waktu dan sumber daya yang dihabiskan untuk mengatasi perbedaan sistem, seperti mengkonversi data atau mengirim informasi melalui saluran yang tidak optimal. Kondisi tersebut dapat menurunkan efektivitas dan efisiensi keseluruhan dalam pelaksanaan strategi diplomasi militer.

**Kata kunci:** Diplomasi Militer, Konflik Laut China Selatan, Nine Dash Line, Pengambilan Keputusan Strategis, Peran Sistem Informasi

**Abstract.** *The nine-dash line is a unilateral territorial claim by China over the waters of the South China Sea. Indonesia stated that there would be no compromise in defending its sovereignty. Indonesia is firm and prioritizes peaceful diplomatic efforts in dealing with the conflict in the Natuna Waters. Diplomacy related to national defense and security is using military diplomacy. The success of a military diplomacy strategy is a collaboration of diplomacy, defense, and development components that are integrated into an information system. In the context of the complex and sensitive conflict in the South China Sea, decision-making in such situations requires accurate, fast, and up-to-date information to formulate effective policies. The research method uses qualitative with a case study approach. Data were obtained through observation, interviews, and literature studies. The results of the study illustrate that the role of information systems is increasingly crucial in supporting the implementation of effective military diplomacy. The information system supporting military diplomacy is not yet optimal because each data center and information center in the Ministry of Defense and in the TNI environment has not been fully integrated. The hedging method is decided based on indepth analysis obtained from the information system. However, without interoperability, a lot of time and resources are spent on overcoming system differences, such as converting data or sending information through non-optimal channels. This condition can reduce the overall effectiveness and efficiency in implementing military diplomacy strategies.*

**Keywords:** Military Diplomacy, Nine Dash Line, Role of Information Systems, South China Sea Conflict, Strategic Decision Making.

---

## 1. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan menyebutkan, Pemerintah menjadi penyelenggara pertahanan negara yang secara dini mempersiapkannya dengan sistem pertahanan negara. Tentara Nasional Indonesia (TNI) ditempatkan sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara. TNI mendapatkan dukungan dari komponen cadangan dan komponen lainnya. Penyelenggaraan pertahanan negara dicapai melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa dalam menanggulangi setiap ancaman. Ancaman militer terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) cukup intensif terjadi di Laut China Selatan. Ancaman terhadap kedaulatan NKRI di Laut China Selatan tidak selalu secara langsung melibatkan militer suatu negara. Ancaman kedaulatan sering kali terjadi melalui pencurian ikan oleh kapal-kapal penangkap ikan berbendera asing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Menjadi ancaman militer ketika kapal-kapal asing penangkap ikan yang memasuki ZEE Indonesia tersebut dikawal kapal *coast guard* atau kapal perang.

Laut China Selatan memiliki luas sekira 3,5 juta kilometer persegi terletak di wilayah perairan Asia Timur dan Asia Tenggara. Laut China Selatan menyentuh garis pantai negara-negara seperti China, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, Indonesia, Taiwan. Laut China Selatan merupakan jalur yang bernilai strategis sebagai *Sea Lines of Trade* (SLOT) dan *Sea Line of Communications* (SLOC) yang menghubungkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Laut China Selatan merupakan jalur perdagangan maritime yang sangat penting bagi perekonomian global, dengan sekitar 30% perdagangan dunia melewati wilayah tersebut setiap tahunnya. Di samping itu, Laut China Selatan memiliki kekayaan sumber daya alam, seperti ikan, minyak bumi, gas alam, dan potensi tambang mineral lainnya. Laut China Selatan merupakan wilayah strategis dan kaya akan sumber daya alam sehingga menjadi wilayah sengketa dan konflik. Konflik di Laut China Selatan sudah berlangsung lama dan belum menemukan solusi damai meskipun ASEAN dan Tiongkok melakukan berbagai upaya Menurut (Lisbet, 2023: 8-9). Upaya damai yang sudah dilakukan antara ASEAN dengan Tiongkok di antaranya adalah *Declaration on Conduct (DOC) of the Parties in the South China Sea* pada 4 November 2002 di Phnom Penh, Kamboja. DOC tersebut berisi komitmen China dan negara-negara ASEAN untuk mematuhi prinsip-prinsip hukum internasional, menyelesaikan sengketa secara damai, dan menahan diri dari tindakan yang dapat meningkatkan eskalasi. Upaya damai berikutnya adalah ASEAN dan Tiongkok menyepakati *Guidelines for the Implementation of the DOC*, pada tahun 2011, di Bali.

Kesepakatan tersebut menandai dimulainya pembahasan awal mengenai pembentukan *Regional Code of Conduct in the South China Sea* (CoC) di Laut China Selatan. Fungsi kesepakatan ini adalah untuk menghadirkan seperangkat mekanisme peraturan tata perilaku untuk negara-negara yang berkepentingan di Laut China Selatan. Tetapi, Tiongkok meningkatkan kekuatan Angkatan lautnya guna memperkuat klaim atas Laut China Selatan, melalui konsep *nine dash line* (Triwahyuni, 2010: 41). Jalur *nine dash line* membentang sejauh 2.000 km dari daratan Tiongkok hingga memasuki wilayah perairan Malaysia, Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, Indonesia. Sedangkan wilayah ZEE Indonesia, dan anggota ASEAN lainnya, ditetapkan oleh hukum internasional yaitu *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982. UNCLOS 1982, berisi penetapan batas-batas ZEE dari setiap negara yang

kaitannya dengan hak melakukan eksploitasi dan kebijakan lain di wilayah perairannya sesuai dengan hukum laut internasional.

Pemerintah Indonesia melalui Sekretariat Kabinet (Setkab, 2020) mengeluarkan pernyataan resmi: *pertama*, kapal-kapal Tiongkok melakukan pelanggaran dengan memasuki wilayah ZEE Indonesia. *Kedua*, *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 merupakan hukum internasional yang sudah menetapkan wilayah ZEE Indonesia. *Ketiga*, Tiongkok berkewajiban menghormati dan mengimplementasikan UNCLOS 1982 menjadi negara partisipan dan menandatangani UNCLOS 1982. *Keempat*, klaim sepihak Tiongkok melalui konsep *nine dash line* tidak memiliki alasan dan landasan hukum internasional terutama UNCLOS 1982, sehingga klaim Tiongkok tersebut tidak akan pernah diakui oleh Indonesia.

Dinamika keamanan di kawasan khususnya Laut China Selatan, berpengaruh sangat besar terhadap pertahanan yang ingin dicapai (Prihartono, 2022: 5885). Berkaitan dengan itu, kepentingan pertahanan nasional Indonesia perlu dikomunikasikan kepada negara-negara di kawasan. Komunikasi yang baik akan menghindarkan terjadinya miskomunikasi dan misinterpretasi dari negara-negara di kawasan terhadap kebijakan pertahanan Indonesia di perairan Natuna yang berpotensi membawa instabilitas keamanan di Laut China Selatan. Pemerintah Indonesia memprioritaskan usaha diplomatik secara damai dalam memelihara keamanan dan menangani konflik, melalui dialog-dialog konstruktif. Dialog konstruktif dilakukan dengan negara anggota ASEAN dan negara lainnya yang berada di luar regional ASEAN. Diplomasi terkait pertahanan keamanan nasional menggunakan diplomasi militer atau diplomasi pertahanan. Guna mencapai target kebijakan luar negeri, khususnya di bidang pertahanan dan keamanan, yaitu keamanan negara, dapat menggunakan diplomasi militer. Pedrason (2015: 15) menyebutkan, diplomasi militer terdiri dari gabungan sektor ekonomi, politik, budaya, pertahanan, dan kemanan yang ditujukan untuk membangun hubungan pertemanan antar negara-negara, membangun kerjasama, dan terpenting adalah meningkatkan kepercayaan antar negara.

Terdapat beberapa kasus misi diplomasi pertahanan atau diplomasi militer terkesan berjalan sendiri-sendiri. Faktor penyebabnya di antaranya adalah: *pertama*, Kementerian Luar Negeri dengan TNI belum memiliki jalur koordinasi yang baik sehingga penyusunan *mission paper* kurang optimal. *Kedua*, Kementerian Luar Negeri tidak menyusun *mission paper* yang akan digunakan oleh kepala perwakilan, tetapi *mission paper* disusun oleh calon duta besar. Bahkan panduan pelaksanaan tugas diplomasi yang tercantum dalam *mission paper* tidak dimiliki oleh sebagian besar Atase Pertahanan RI (Sudarsono, dkk, 2018: 93-94). Sistem informasi sudah banyak digunakan oleh negara-negara di dunia. Tiongkok membangun *Strategic Support* (SS) pada tahun 2016. Misi perang angkasa, perang siber, perang elektronik, dan perang psikologis disentralisasi kedalam SS. Dengan mendominasi informasi dalam spektrum elektromagnetik dan menghalangi penggunaannya oleh musuh, Tiongkok percaya secara strategis akan unggul dalam konflik (Djelantik, 2021). Sedangkan Amerika Serikat (AS) yang melibatkan diri dalam konflik Laut China Selatan, membangun Combined Joint-All Domain Command and Control (CJADC2), pada akhir tahun 2023. CJADC2 bertujuan untuk menghubungkan berbagai sensor, penembak, aliran data Angkatan bersenjata AS dan mitra internasionalnya, di bawah jaringan yang lebih terpadu agar pengambilan keputusan lebih baik dan lebih cepat.

Salah satu militer negara anggota ASEAN yaitu Angkatan Bersenjata Singapura (SAF/*Singapore Armed Forces*), membentuk *the Digital and Intelligence Service* (DIS). DIS ditujukan untuk memenuhi misi Singapura guna mempertahankan perdamaian dan keamanan negaranya dari ancaman yang berkembang dan semakin kompleks, melalui kekuatan dan kemampuan digital. DIS sebagai bagian dari SAF yang terintegrasi, memungkinkan SAF untuk beroperasi lebih baik sebagai kekuatan yang berjejaring dan terintegrasi untuk menghadapi spektrum ancaman eksternal yang lebih guna meningkatkan dan menjaga perdamaian serta kedaulatan Singapura. Berdasarkan latar belakang di atas, dalam konteks konflik di Laut China Selatan yang kompleks dan sensitif, pengambilan keputusan dalam situasi tersebut memerlukan informasi yang akurat, cepat, dan terkini untuk merumuskan kebijakan yang efektif. Oleh karena itu, implementasi sistem informasi dalam diplomasi militer menjadi krusial untuk memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang tepat dalam menghadapi tantangan geopolitik di wilayah tersebut.

## 2. Tinjauan Pustaka

Informasi adalah data yang diproses menjadi suatu bentuk yang lebih berguna dan berarti bagi penerima dalam aktivitas pembuatan keputusan. Informasi berkualitas memiliki karakteristik *Effectiveness, Efficiency, Confidentiality, Integrity, Availability, Compliance, dan Reliability* (Gelinas dan Dull, 2012: 19). Sistem Informasi adalah suatu sistem didalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang dibutuhkan (Hutahaean, 2015: 13). Sedangkan menurut Wallace (2021: 9), sistem informasi adalah sistem yang mempersatukan komponen unik dan terpisah untuk diolah menjadi informasi hingga distribusi informasi. Sistem informasi memiliki fungsi untuk menghasilkan dan menyediakan informasi penting dengan cara proses pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data. (Satzinger, Robert, dan Stephen, 2016: 4).

Sistem informasi yang baik dapat digunakan tidak hanya untuk penyimpanan data secara elektronik saja tetapi harus mampu mendukung proses analisis yang diperlukan oleh manajemen. Adanya dukungan sistem informasi yang baik maka dapat diperoleh informasi yang akurat, terpercaya, mutakhir dan mudah diakses mengenai kondisi nyata di lapangan, sehingga keputusan-keputusan yang diambil pun dapat lebih cepat dan presisi terhadap dinamika pasar yang ada. (Idris dan Delvika, 2014). Dalam konteks militer, sistem informasi berperan penting dalam mengordinasikan dan mengendalikan operasi militer. Oleh karena itu, sistem informasi yang bersifat *command center* (pusat komando) berfungsi sebagai pengawasan dan informasi yang akurat. *Command center* merupakan pusat komunikasi dan pengambilan keputusan strategis karena informasi dari berbagai sumber dikumpulkan, dianalisis, dan digunakan untuk memantau dan mengendalikan situasi di lapangan, termasuk pengoperasian untuk sistem keamanan. Penerapan *command center* dapat meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan pemantauan dan pengendalian, serta memfasilitasi pengambilan keputusan yang cepat dan tepat berdasarkan data yang dianalisis dengan baik.

Diplomasi menjadi alat utama dalam hubungan internasional, sedangkan perang menjadi langkah terakhir (Surachman, 2019: 6.14). Persoalan diplomasi yang utama adalah tentang

bagaimana mengoptimalkan kekuatan-kekuatan nasional yang tersedia, pada waktu dan tempat yang tepat, sehingga menjadi suatu realitas politik dan kekuatan yang sesungguhnya. Tujuan utama diplomasi adalah untuk memajukan kepentingan nasional, karena itulah maka, sangat diperlukan suatu bentuk diplomasi yang mampu melibatkan semua komponen suatu negara dalam suatu sinergi, dan memandang substansi permasalahan secara integratif, atau yang biasa disebut sebagai diplomasi total, dimana isu dalam negeri dan luar negeri merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. (Surachman, 2019: 6.39-6.40).

Dalam pelaksanaannya, diplomasi pertahanan dan diplomasi militer memiliki perbedaan. Fokus dari diplomasi pertahanan adalah membenahi hubungan, baik melalui jalur formal ataupun jalur informal, di antara negara-negara. Berbeda dengan diplomasi militer yang dalam pelaksanaannya mengenai isu keamanan menggunakan kekuatan militer dalam tahap diplomasinya. Bagi suatu negara, diplomasi pertahanan dan diplomasi militer menjadi bagian paling penting dalam kebijakan pertahanan, keamanan dan kebijakan luar negeri. Adanya diplomasi pertahanan dan diplomasi militer merupakan buah kepercayaan dan bentuk dukungan dari berbagai negara dalam pertemuan bilateral maupun multilateral untuk membahas permasalahan keamanan di tingkat regional maupun tingkat dunia (Saragih, 2018).

Diplomasi pertahanan dan diplomasi militer dipraktikkan dalam dua konteks berbeda yaitu pragmatis dan transformatif: yang pragmatis adalah dengan tujuan mempertahankan yang sudah ada dan dilakukan, sementara yang transformative berorientasi untuk merubah ke arah yang diinginkan (Pedrason, 2021: 8). Teori keputusan adalah teori mengenai cara manusia memilih pilihan diantara pilihan-pilihan yang tersedia secara acak guna mencapai tujuan yang hendak diraih (Hansen, 2005). Sinoem (2013: 4) menyatakan bahwa pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti (*decision making under certainty*) adalah pengambilan keputusan dimana terjadi hal-hal berikut (1) Tidak diketahui jumlah dan kemungkinan munculnya kondisi tersebut. (2) Pengambilan keputusan tidak dapat menentukan probabilitas terjadinya berbagai kondisi atau hasil yang keluar. (3) Yang diketahui hanyalah kemungkinan hasil suatu tindakan, tetapi tidak dapat diprediksi berapa besar probabilitas setiap hasil tersebut. (4) Pengambil keputusan tidak mempunyai pengetahuan atau informasi lengkap mengenai peluang terjadinya bermacam-macam keadaan tersebut. (5) Hal yang akan diputuskan biasanya relatif belum pernah terjadi. Tingkat ketidakpastian keputusan semacam ini dapat dikurangi dengan beberapa cara antara lain mencari informasi lebih banyak, melalui riset atau penelitian dan menggunakan probabilitas subjektif.

Krismiaji (2012: 208) menyatakan bahwa proses pembuatan keputusan melibatkan tahap-tahap berikut: 1. Mengidentifikasi dan mendefinisikan persoalan yang timbul. 2. Mengidentifikasi berbagai alternatif kemungkinan penyelesaian persoalan, dan mengeliminasi alternatif yang tidak layak atau tidak feasible. 3. Mengidentifikasi manfaat dan pengorbanan untuk setiap alternatif yang feasible. Klarifikasikan manfaat dan biaya tersebut ke dalam kelompok manfaat relevan dan manfaat tidak relevan, dan eliminasi manfaat yang tidak relevan. 4. Mengumpulkan data pendukung tentang seluruh biaya dan manfaat yang relevan, dan pastikan data tersebut terjadi pada periode atau rentang waktu yang sama. 5. Jumlahkan seluruh biaya relevan dan manfaat relevan untuk setiap alternatif. 6. Pilih alternatif terbaik, yaitu alternatif yang menghasilkan manfaat terbesar dan pengorbanan (biaya) terkecil (*least cost most benefit*).

### 3. Metode Penelitian

Metode Penelitian Kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah sosial dan kemanusiaan yang dialami oleh kelompok tertentu atau individu (Creswell, 2010: 4). Individu-individu tersebut menjadi informan sekaligus subyek penelitian yang memahami keseharian di dalam lingkungan hidupnya (Idrus, 2009: 23). Penelitian kualitatif dalam prosesnya berlandaskan metodologi dimana peneliti dan informan berhubungan erat guna menyelidiki fenomena sosial dengan penekanan pada sifat realitas terbangun secara sosial (Noor, 2017: 32).

Pendekatan studi kasus digunakan peneliti untuk memahami obyek yang diteliti. Tujuan digunakannya pendekatan studi kasus adalah untuk mendalami jawaban pertanyaan bagaimana (*why*) keberadaan dan mengapa (*why*) suatu kasus terjadi, bukan hanya sekedar menjawab tentang apa (*what*) kasusnya atau apa obyek yang ditelitinya, dan siapa (*who*) pelaku dalam kasus (Yin, 2011: 2). Lebih jauh lagi, studi kasus untuk menjawab pertanyaan yang komprehensif dan menyeluruh tentang *how* dan *why* suatu obyek dapat dipandang sebagai suatu kasus dengan mencari jawaban bagaimana dan mengapa suatu obyek terjadi dan terbentuk.

Dengan demikian, penelitian yang menggunakan studi kasus bertujuan untuk menganalisis suatu kasus secara intensif, mendalam, mendetail, dan menyeluruh. Terdapat beberapa kasus misi diplomasi pertahanan atau diplomasi militer terkesan berjalan sendiri-sendiri. Faktor penyebabnya di antaranya adalah: hubungan komunikasi antara Kementerian Luar Negeri dengan TNI belum terlaksana dengan baik sehingga *mission paper* yang akan digunakan sebagai panduan diplomasi militer belum tersusun dengan baik. Indonesia membutuhkan sistem informasi yang sinergis dan terintegrasi.

### 4. Hasil dan Pembahasan

Ancaman dan tantangan terhadap pertahanan dan keamanan Indonesia yang muncul dari konflik di kawasan Laut China Selatan. Klaim Tiongkok atas sebagian besar Laut China Selatan, yang mencakup "sembilan garis putus," tumpang tindih dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di sekitar Kepulauan Natuna. Hal ini menyebabkan insiden pelanggaran wilayah oleh kapal-kapal penangkap ikan dan kapal penjaga pantai Tiongkok. Selain itu, Peningkatan kehadiran militer Tiongkok di Laut China Selatan menimbulkan kekhawatiran bagi Indonesia terkait potensi eskalasi militer dan dampaknya terhadap keamanan maritim di kawasan tersebut.



Gambar 4.1: Garis putus-putus (*nine dash line*) yang diklaim Tiongkok  
Sumber: detiknews



Gambar 4.2: Garis putus-putus (*nine dash line*) yang diklaim Tiongkok masuk ke wilayah ZEE Indonesia.  
Sumber: sindonews.com

Guna mengurangi ketegangan di kawasan Laut China Selatan, Indonesia perlu memperkuat diplomasi pertahanan atau diplomasi militer, dan kerja sama militer dengan negara-negara tetangga untuk menjaga stabilitas regional. Indonesia perlu terus memainkan peran aktif dalam diplomasi regional, termasuk melalui ASEAN, untuk mendorong penyelesaian konflik secara damai dan berbasis hukum internasional. Indonesia juga harus mendukung upaya untuk menyusun dan mengimplementasikan *Code of Conduct* (COC) di Laut China Selatan.

Dengan pendekatan yang komprehensif, Indonesia dapat mengelola ancaman dan tantangan dari konflik Laut China Selatan serta memastikan keamanan dan kedaulatan wilayahnya. Isu maritim di Laut China Selatan sangat kompleks karena adanya klaim territorial yang tumpang tindih, interpretasi atas hukum internasional yang berbeda-beda, yang melibatkan kepentingan nasional negara-negara kawasan. Dalam menyikapi dinamika di Laut China Selatan tersebut, dibutuhkan sarana dan prasarana yang mendukung pengambilan keputusan strategis, yaitu sistem informasi yang komprehensif dan akurat. Sistem informasi yang komprehensif dan akurat dimaksud harus mampu menyediakan data analisisnya yang relevan dengan aspek-aspek mengenai konflik di Laut China Selatan. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengimplementasikan sistem informasi yang dapat memberikan kontribusi terhadap pengambilan keputusan strategis dalam berbagai cara. Melalui sistem informasi, data-data informasi seperti grafik, peta ataupun *dashboard* lebih mudah dipahami dapat divisualisasikan sehingga dapat mempermudah pimpinan melihat gambaran umum suatu permasalahan yang pada gilirannya akan pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih baik.

Di samping itu, melalui visualisasi tersebut, akan tergambarkan berbagai hal yang memungkinkan permasalahan yang ada dibuatkan pemodelan dalam berbagai skenario sehingga dapat mengavaluasi potensi dampak dari berbagai keputusan yang diambil nantinya, sehingga dapat membantu mengantisipasi berbagai risiko buruk atau tidak tepat. Dengan demikian, keputusan dalam menentukan strategi dapat dipilih yang paling tepat. Sistem informasi yang baik dapat digunakan tidak hanya untuk penyimpanan data secara elektronik saja tetapi harus mampu mendukung proses analisis yang diperlukan oleh manajemen. Sehingga dengan dukungan sistem informasi yang baik maka dapat diperoleh informasi yang akurat, terpercaya, mutakhir dan mudah diakses mengenai kondisi lingkungan. Dengan adanya laporan yang tersaji dengan cepat dan setiap saat dapat diakses tersebut maka keputusan-keputusan yang diambil pun dapat lebih cepat dan presisi terhadap dinamika lingkungan yang ada. (Idris dan Delvika, 2014).

Sistem informasi adalah sistem yang mempersatukan komponen unik dan terpisah untuk diolah menjadi informasi. Proses pengolahan terbagi menjadi empat, yaitu proses pengumpulan, proses mengatur, proses analisis, dan proses distribusi. Komponen penting yang memiliki fungsi untuk diolah yaitu orang, teknologi, proses, dan data. Data yang diolah oleh sistem akan berubah menjadi informasi. Informasi adalah data yang memiliki nilai penting. Sistem informasi memiliki fungsi untuk menghasilkan dan menyediakan informasi penting dengan cara proses pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data (Satzinger, Robert, dan Stephen (2016: 4). Sedangkan informasi sendiri adalah data yang diproses menjadi suatu bentuk yang lebih berguna dan berarti bagi penerima dalam aktivitas pembuatan keputusan. Oleh karena itu, informasi harus berkualitas, yaitu yang memiliki karakteristik *effectiveness*, *efficiency*, *confidentiality*, *integrity*, *Availability*, *compliance*, dan *reliability* (Gelinas dan Dull, 2012: 19). Sedangkan keputusan strategis keputusan untuk menjawab tantangan dan perubahan lingkungan dan biasanya bersifat jangka panjang. Tujuan keseluruhan dari pengambilan keputusan strategis (*strategic decision making*) adalah untuk memilih strategi alternatif sehingga keunggulan kompetitif jangka panjang dapat tercapai. (Salusu, 2006: 111).

TNI sudah memanfaatkan teknologi informasi untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah data menjadi informasi. Kondisi eksisting sistem terkait konflik Laut China Selatan dari sisi integrasi telah memiliki seperti infrastruktur komunikasi militer yang cukup baik, Sistem Informasi Manajemen (SIM), *Geographic Information System* (GIS), Sistem Pendukung Keputusan (SPK), Sistem Informasi Eksekutif (SIE), sistem surveillence, dan sistem berbasis C4ISR (*Command, Control, Communications, Computer, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance*), hingga Sistem Manajem Krisis. Sistem informasi TNI telah memungkinkan integrasi antar-matra (Darat, Laut, Udara) dalam mendukung operasi yang melibatkan diplomasi militer, seperti latihan militer gabungan internasional dan operasi perdamaian. TNI pun mengembangkan sistem informasi yang memungkinkan interoperabilitas dengan lembaga-lembaga pemerintah seperti Kementerian Luar Negeri dan Badan Intelijen Negara yang memungkinkan terjadi pertukaran informasi strategis yang penting untuk diplomasi militer dan kebijakan luar negeri.

Akan tetapi, semua sistem informasi tersebut secara interoperabilitas belum penuh. Hal itu dikarenakan masing-masing sistem informasi di Pusdatin Kemhan, Pusinfomar, Pusinfohahta, dan Pusdalops belum terhubung satu sama lain sehingga belum dapat digunakan untuk saling bertukar data secara otomatis. Pertukaran informasi masih menggunakan intervensi operator manusia. Selain itu, masih terdapat kendala dalam akses dan pemrosesan data dari berbagai sumber serta analisis data yang lebih mendalam, termasuk analisis big data, sehingga dapat membatasi kecepatan dan ketepatan informasi yang tersedia bagi pengambil keputusan. Ketika sistem informasi milik TNI atau militer lainnya belum mencapai tingkat interoperabilitas yang optimal, terdapat beberapa dampak negatif terhadap pengambilan keputusan strategis dalam konteks diplomasi militer. Dampak yang dapat timbul adalah kesulitan dalam pertukaran informasi, keputusan yang kurang informed (terinformasi), kurangnya sinkronisasi operasional, rendahnya efisiensi dan efektivitas, tingkat keamanan yang inkonsisten, serta hambatan dalam kolaborasi internasional. Kurangnya interoperabilitas dalam sistem informasi militer dapat merusak integritas dan ketepatan pengambilan keputusan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi posisi strategis sebuah negara dalam kancah diplomasi militer internasional.

Konflik Laut China Selatan merupakan isu kompleks yang melibatkan banyak negara dan kepentingan strategis. Untuk mengambil keputusan yang tepat dan efektif dalam menghadapi dinamika yang cepat berubah di wilayah ini, TNI sangat bergantung pada sistem informasi yang canggih dan terintegrasi. Sistem informasi memainkan peran yang semakin penting dalam mendukung pengambilan keputusan strategis terkait konflik Laut China Selatan. Dengan memanfaatkan teknologi yang ada, TNI dapat meningkatkan kemampuannya dalam memantau situasi, menganalisis data, dan membuat keputusan yang lebih baik. Namun, untuk mencapai potensi penuh dari sistem informasi, diperlukan investasi yang berkelanjutan dalam pengembangan teknologi, pelatihan personel, dan peningkatan kerjasama antar lembaga. Dalam konteks militer, sistem informasi berperan penting dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan operasi militer. Oleh karena itu, sistem informasi yang bersifat *command center* (pusat komando) berfungsi sebagai pengawasan dan informasi yang akurat. *Command center* merupakan pusat komunikasi dan pengambilan keputusan strategis karena informasi dari berbagai sumber dikumpulkan, dianalisis, dan digunakan untuk memantau dan mengendalikan situasi di lapangan, termasuk pengoperasian untuk sistem keamanan. Penerapan *command center* dapat meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan pemantauan dan pengendalian, serta memfasilitasi pengambilan keputusan yang cepat dan tepat berdasarkan data yang dianalisis dengan baik.

Akan tetapi, sistem informasi di lingkungan TNI yang mendukung keputusan strategis terkait konflik di kawasan Laut China Selatan, belum terintegrasi secara penuh. Sehingga masih perlu dikembangkan lebih lanjut, terutama dalam hal integrasi sistem, keamanan siber, dan kemampuan analisis data untuk menghadapi tantangan geopolitik yang kompleks. Sejauh ini, data-data yang terangkum tersimpan dan diolah di masing-masing repositori Pusdatin Kemhan, Pusinfotha, Pusinfohar, dan Pusdalops. Semua data di masing-masing lembaga tersebut belum saling terhubung secara otomatis satu sama lain, sehingga akan menyulitkan pengambil keputusan untuk membuat skenario, perencanaan, dan strategi diplomasi militer. Bahkan sistem informasi yang ada belum terkoneksi secara otomatis dengan Puskersin sebagai Pembina Diplomasi Militer TNI.

Kondisi tersebut akan berdampak pada pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti (*decision making under certainty*), adalah pengambilan keputusan dimana terjadi hal-hal berikut (1) Tidak diketahui jumlah dan kemungkinan munculnya kondisi tersebut. (2) Pengambilan keputusan tidak dapat menentukan probabilitas terjadinya berbagai kondisi atau hasil yang keluar. (3) Yang diketahui hanyalah kemungkinan hasil suatu tindakan tetapi tidak dapat diprediksi berapa besar probabilitas setiap hasil tersebut. (4) Pengambil keputusan tidak mempunyai pengetahuan atau informasi lengkap mengenai peluang terjadinya bermacam-macam keadaan tersebut. (5) Hal yang akan diputuskan biasanya relative belum pernah terjadi. (Sinoem, 2013: 4).

Dampak paling umum yang dikaitkan orang dengan pengambilan keputusan dalam ketidakpastian adalah risiko, dan seberapa toleran seseorang terhadap scenario berisiko. Dalam situasi berbasis risiko, kita memiliki gambaran tentang kemungkinan berbagai hasil yang dapat dihasilkan oleh keputusan kita. Tentunya, pengambilan keputusan tidak boleh diambil dalam kondisi tidak pasti yang berisiko terancamnya pertahanan dan keamanan yang berkaitan langsung dengan kedaulatan negara di kawasan Laut China Selatan. Dengan demikian, untuk

---

lebih mendukung diplomasi militer, TNI perlu meningkatkan interoperabilitas sistem, kualitas data, dan kemampuan analisis prediktif.

Selain itu, penting untuk membangun kultur organisasi yang mendukung adopsi teknologi informasi baru serta memperkuat kolaborasi antar lembaga. Organisasi-organisasi di dunia sudah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam menjalankan organisasinya. NATO misalnya sudah menggunakan sistem informasi yang dinamakan Sistem Informasi dan Komunikasi NATO (NICS/*NATO Information and Communication System*) dan Sistem Pertukaran Intelijen NATO (NISE/*NATO Intelligence Exchange System*). Sistem informasi tersebut digunakan NATO untuk sarana komunikasi, pertukaran intelijen, hingga perencanaan operasi militer bersama. Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pun memanfaatkan sistem informasi yang digunakan untuk memantau situasi keamanan di seluruh dunia, mendukung operasi penjaga perdamaian, hingga memfasilitasi dialog dan negosiasi antar pihak yang terlibat dalam konflik. UNOSOM merupakan sistem informasi PBB untuk Operasi Penjaga Perdamaian, dan sistem informasi yang dinamakan UN-GLOPS yaitu Jaringan Global PBB untuk Operasi Penjaga Perdamaian.

Hal itu menggambarkan bahwa sistem informasi memiliki peran sangat penting dalam diplomasi militer yang akan membantu negara mencapai tujuan diplomatik dan pertahanan keamanan negara, membangun kepercayaan, penyelesaian konflik secara damai, dan meningkakan keamanan global dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Diplomasi mempunyai kekuatan yang tidak kalah hebatnya dengan armada perang. Bahkan, dibandingkan armada militer, diplomasi mempunyai kekuatan besar yang tidak menghancurkan atau memakan korban jiwa. Dan terjadinya perang dapat dicegah oleh kekuatan diplomasi. Namun, tidak demikian sebaliknya. Perang tidak akan mampu mencegah diplomasi. Oleh karena itu, diplomasi menjadi alat utama dalam hubungan internasional, sedangkan perang menjadi langkah terakhir. (Surachman, 2019: 6.14)

Diplomasi militer fokus pada penggunaan kekuatan dari militer dalam tahap diplomasi mengenai sekumpulan isu keamanan. Diplomasi militer menjadi bagian terpenting dalam kebijakan pertahanan, keamanan dan juga kebijakan luar negeri pada suatu negara. Kondisi ini merupakan hasil dari kepercayaan dan juga bentuk dukungan berbagai negara dalam pertemuan multilateral untuk membahas persoalan keamanan pada tingkat regional hingga internasional (Saragih, 2018). Keterlibatan Indonesia di kawasan Laut Tiongkok Selatan merupakan tindakan nyata atas penolakan secara langsung terkait pengklaiman pemerintah Tiongkok terhadap kawasan Laut Tiongkok Selatan. Selain itu juga Indonesia mengamankan wilayah teritorialnya berdasarkan letak geografis agar tidak terjadi tindakan pengklaiman oleh negara lain secara ilegal. Dengan demikian, diplomasi militer dalam konteks konflik Laut China Selatan harus diarahkan untuk mempromosikan stabilitas, keamanan, dan penyelesaian damai sengketa di Laut China Selatan, sambil menghormati hukum internasional dan kedaulatan negara-negara di wilayah tersebut. Diplomasi militer adalah suatu instrumen kebijakan luar negeri yang melibatkan penggunaan kekuatan militer sebagai alat untuk mencapai tujuan politik. Dalam era digital seperti sekarang, peran sistem informasi semakin krusial dalam mendukung pelaksanaan diplomasi militer yang efektif. Agar diplomasi militer berjalan dengan optimal diperlukan koordinasi yang erat diantara pelaksana diplomasi militer. Koordinasi itu sendiri melibatkan Kementerian Pertahanan, Mabes TNI dan *focal point diplomacy*, yaitu Kementerian Luar Negeri.

Koordinasi tersebut mutlak perlu dilakukan karena diplomasi militer merupakan bagian dari diplomasi total suatu negara, dalam hal ini adalah Indonesia, agar tercipta suatu diplomasi yang koheren dan fokus.

Diplomasi militer tentunya akan terkait dengan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, yaitu dalam konteks konflik di kawasan Laut China Selatan, dimana perairan Natuna masuk ke dalam *nine dash line* yang dianggap sebagai bagian dari wilayah teritorial Negara Tiongkok. Diplomasi militer mempunyai tujuan antara lain sebagai kehadiran atau perwakilan (*representation*), efek daya tangkal (*deterrence effect*) negosiasi dan posisi tawar (*bargaining position*), meningkatkan kontak (*increasing capability*), opini publik (*public opinion*) serta membangun saling percaya (*confidence building measure*) (Supriyanto, 2014). Keberadaan militer dalam proses diplomasi memberikan suatu daya tawar sendiri, karena dengan adanya diplomasi militer maka negara lain akan sangat memperhatikan kekuatan dan keberadaan kita. Berkaitan dengan itu, ancaman (*threat*) negara Tiongkok di kawasan Laut China Selatan disikapi dengan cara *hedging*, yaitu tetap dekat dengan negara pengancam namun juga berusaha menyeimbangkannya. Hal itu terlihat dari hubungan bilateral antara Jakarta – Beijing tetap berlangsung dengan baik.

Tetapi di sisi lain, Indonesia menambah kekuatannya di perairan Natuna yang masuk ke dalam ZEE Indonesia. TNI sedikitnya menambah satu batalion untuk memperkuat pangkalan Angkatan Laut di Natuna. Angkatan Darat menambah pasukannya menjadi lebih dari 2.000 prajurit. Angkatan Udara menambah pesawat tempur untuk memperkuat patroli udara. Sedangkan Angkatan Laut mengirim 20 kapal perang ke perairan Natuna untuk berpatroli, mengawasi, dan menjaga kedaulatan. Sektor pertahanan udara mengerahkan radar di beberapa bagian pulau untuk melakukan operasi pengawasan selama 24 jam. TNI pun menggelar latihan militer di perairan Laut Natuna Utara sebagai bentuk kesiapan menghadapi perang dan bentuk diplomasi militer bahwa Indonesia memiliki kekuatan untuk menjaga kedaulatannya. Cara *hedging* diputuskan berdasarkan analisa mendalam yang diperoleh dari sistem informasi. Tetapi, tanpa interoperabilitas, banyak waktu dan sumber daya yang dihabiskan untuk mengatasi perbedaan sistem, seperti mengkonversi data atau mengirim informasi melalui saluran yang tidak optimal. Kondisi tersebut dapat menurunkan efektivitas dan efisiensi keseluruhan dalam pelaksanaan strategi diplomasi militer. Hal itu terlihat dari masih adanya pencurian iklan di ZEE Indonesia oleh kapal-kapal nelayan asing.

## 5. Kesimpulan dan Saran

TNI dapat meningkatkan kemampuannya dalam memantau situasi, menganalisis data, dan membuat keputusan yang lebih baik dengan memanfaatkan teknologi informasi atau sistem informasi yang ada. Akan tetapi, sistem informasi di lingkungan TNI yang mendukung keputusan strategis terkait konflik di kawasan Laut China Selatan, belum terintegrasi secara penuh. Semua data di masing-masing lembaga seperti Pusdatin Kemhan, Pusinfohta, Pusinfomar, dan Pusedalops belum saling terhubung secara otomatis satu sama lain, sehingga akan menyulitkan pengambil keputusan untuk membuat skenario, perencanaan, dan strategi diplomasi militer. Bahkan sistem informasi yang ada belum terkoneksi secara otomatis dengan Puskersin sebagai Pembina Diplomasi Militer TNI. Puskersin yang bertanggung jawab dalam

---

diplomasi militer harus mempunyai data pasti sebelum menjalankan misi diplomatiknya agar terhindar dari risiko kegagalan yang akan berdampak pada kedaulatan, khususnya di ZEE

Indonesia di perairan Natuna. Oleh karena itu sistem informasi perlu dikembangkan lebih lanjut, terutama dalam hal integrasi sistem, keamanan siber, dan kemampuan analisis data untuk menghadapi tantangan geopolitik yang kompleks. Sistem informasi bersifat *command center* (pusat komando) berperan penting dalam mengordinasikan dan mengendalikan operasi militer termasuk diplomasi militer. Penerapan *command center* dapat meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan pemantauan dan pengendalian, serta memfasilitasi pengambilan keputusan yang cepat dan tepat berdasarkan data yang dianalisis dengan baik. Dengan demikian, guna mencapai potensi penuh dari sistem informasi, diperlukan investasi yang berkelanjutan dalam pengembangan teknologi, pelatihan personel, dan peningkatan kerjasama antar lembaga. Hal itu dikarenakan diplomasi militer memerlukan koordinasi optimal diantara pelaksana diplomasi militer. Koordinasi itu sendiri melibatkan Kementerian Pertahanan, Mabes TNI dan *focal point diplomacy*, yaitu Kementerian Luar Negeri. Koordinasi tersebut mutlak perlu dilakukan karena diplomasi militer merupakan bagian dari diplomasi total Indonesia, agar tercipta suatu diplomasi yang koheren dan fokus. Berkaitan dengan itu, ancaman (*threat*) negara Tiongkok di kawasan Laut China Selatan disikapi dengan cara *hedging*, yaitu tetap dekat dengan negara pengancam namun juga berusaha menyeimbangkannya. Hal itu terlihat dari hubungan bilateral antara Jakarta – Beijing tetap berlangsung dengan baik, tetapi di sisi lain Indonesia menambah kekuatan militernya di perairan Natuna yang masuk ke dalam ZEE Indonesia.

Cara *hedging* diputuskan berdasarkan analisa mendalam yang diperoleh dari sistem informasi. Tetapi, tanpa interoperabilitas, banyak waktu dan sumber daya yang dihabiskan untuk mengatasi perbedaan sistem, seperti mengkonversi data atau mengirim informasi melalui saluran yang tidak optimal. Kondisi tersebut dapat menurunkan efektivitas dan efisiensi keseluruhan dalam pelaksanaan strategi diplomasi militer. Hal itu terlihat dari masih adanya pencurian iklan di ZEE Indonesia oleh kapal-kapal nelayan asing. Dengan demikian, Mabes TNI harus fokus mengembangkan *platform* integrasi seperti *middleware* dan API (Antarmuka Pemrograman Aplikasi) yang mampu mengadopsi standar interoperabilitas internasional, memungkinkan sistem yang berbeda berkomunikasi, bertukar data dengan lancar, dan memiliki kemampuan analisis prediktif. Selain itu, Mabes TNI seyogyanya meningkatkan infrastruktur teknologi, termasuk jaringan komunikasi yang lebih kuat, pusat data yang diperbarui, dan server lebih kuat.

Mabes TNI seyogyanya segera mengintegrasikan dan mengembangkan sistem informasi di *command center* yang memiliki kemampuan analisis prediktif, *scenario planning* dan membuat simulasi yang dapat memudahkan Puskersin, sebagai Pembina Diplomasi Militer TNI, dan pengambil keputusan menetapkan strategi diplomasi militer yang tepat.

---

## Daftar Pustaka

### 1. Buku

- Ardianto, Elvinaro. (2011). *Metodologi Penelitian Untuk Public Relations Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Amalia, F. S., Mahroza, J., Halkis, M., Priyanto, P., Purwanto, S., Gunawan, R., ... & David, L. (2024). DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA-AUSTRALIA UNTUK HUMANITARIAN ASSISTANCE AND DISASTER RELIEF (HADR).
- Gelinas, U., & Dull, B. R. (2012). *Accounting Information System, 9th ed.* USA: Cengage Learning.
- Hermansah, F., Mahroza, J., Halkis, M., Prakoso, L. Y., Purwanto, S., Sutanto, R., ... & David, L. (2024). DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA AFGANISTAN DALAM PENYELESAIAN PERDAMAIAN TAHUN 2018-2023.
- Pedrason, Rodon. (2015). *Asean Defence Diplomacy: The Road To Southeast Asian Defence Community*. Heidelberg: University Heidelberg
- Salusu, J. 2006. *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*. Jakarta: Grasindo
- Satzinger, John; Jackson, Robert; & Burd, Stephen. (2016). *Systems Analysis and Design in A Changing World*. Massachusetts: Cengage Learning.
- Supriyanto, Makmur. (2014). *Tentang Ilmu Pertahanan*. Jakarta: Buku Obor.
- Surachman, Akhmad Yani. (2019). *Komunikasi Internasional*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka
- Sigit Purwanto, S. I. P. "Definisi Dan Konsep." *Manajemen Sumber Daya Manusia 1* (2024).
- Wallace, Patricia M. (2019). *Introduction to Information Systems, 4th edition*. USA: Pearson.
- Yin, R. K. (2011). *Qualitative Research From Start to Finish*. New York. London: The Guilford Press.

### 2. Jurnal

- Djelantik, Sukawarsini. (2021). Kekuatan Nasional Tiongkok Dalam Sengketa Laut Tiongkok Selatan. *Indonesian Journal of International Relations Vol.5, No. 2, pp. 292- 319*. DOI: 10.32787/ijir.v5i2.248
- Idris, Iswandi. dan Delvika, Yuana. (2014). Analisis Perancangan Sistem Informasi Terintegrasi di Lingkungan Perguruan Tinggi Swasta di Medan. *Jurnal Teknovasi Volume 01, Nomor 2, 2014, Hlm. 15-26*
- Lisbet. (2023). Ketegangan Filipina dan China di Laut China Selatan serta Upaya ASEAN dalam Mengatasinya. *Info Singkat, Vol. XV, No. 24/II/Pusaka/Desember/2023, hlm. 6-10*. [https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-XV-24-IIP3DI-Desember-2023-238.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XV-24-IIP3DI-Desember-2023-238.pdf)
- Prihartono, Didik. Dinamika Diplomasi Pertahanan Indonesia di Kawasan Asia Tenggara. *Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 3 Oktober 2022, Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut*
- Purwanto, S., Purnomo, M. R., & Budiman, H. (2025). POWER DYNAMICS IN DECISION MAKING: A QUALITATIVE ANALYSIS. *POWER, 2(1), 80-86*.
- Purwanto, S., Hidayatullah, S. S. W., & Tirtoadisuryo, D. HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT STRATEGIES FOR ENHANCING ORGANIZATIONAL PERFORMANCE IN THE DIGITAL ERA.
- Sudarsono, Budyanto Putro. Mahroza, Jonni dan D.W., Surryanto. (2018). Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Mencapai Kepentingan Nasional. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara,*

---

Desember 2018, Volume 8 Nomor 3, hlm. 83-102.  
<https://jurnal.idu.ac.id/index.php/JPBH/article/view/441>

Sukmawati S, S. (2020). Effects of Recruitment, Leadership, and Local Culture on Discipline and Performance of Garuda Contingent Soldiers in Lebanon. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(5), 606-618.

Triwahyuni, D. (2010). Signifikansi Kawasan Asia Tenggara Dalam Kepentingan Amerika Serikat. *Majalah Ilmiah UNIKOM*, 9(1), 33-44.  
[https://jurnal.unikom.ac.id/\\_s/data/jurnal/v09-n01/volume-91-artikel-4.pdf/pdf/volume-91-artikel-4.pdf](https://jurnal.unikom.ac.id/_s/data/jurnal/v09-n01/volume-91-artikel-4.pdf/pdf/volume-91-artikel-4.pdf)

### 3. Media Online

Ariantoko, Provid. (2024). Implementasi *Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance And Reconnaissance* (C4ISR) Puskodal Guskamla Koarmada I Guna Meningkatkan Keamanan Maritim di Selat Malaka. Tesis Fakultas Keamanan Nasional Program Studi Keamanan Maritim.

Humas Setkab. Konflik di Perairan Natuna, Arahan Presiden: Pemerintah Tegas Sekaligus Prioritaskan Diplomati Damai. 5 Januari 2020, <https://setkab.go.id/konflik-di-perairan-natuna-arahan-presiden-pemerintahtegas-sekaligus-prioritaskan-diplomatik-damai/> diunduh pada 15 Maret 2024.

Noor, Juliansyah. (2017). *Metodologi Penelitian "Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana.

Saragih, Hendra Maujana. (2018). Strategi Indonesia dalam Menghadapi Konflik Laut China Selatan. <http://repository.unas.ac.id/263/1/PROSIDING%20HENDRA%20SARAGIH.pdf>

Sinoem, Indrawani. (2013). Pengambilan Keputusan Dalam Kondisi Tidak Pasti. Modul. Universitas Gunadarma. <http://rogayah.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/35768/pengambilan+keputusan+dalam+kondisi+tidak+pa+sti.pdf>.